



**PANITIA SELEKSI
CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN TAHUN 2022**



**PENGUMUMAN
PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN
NOMOR: 04/Pansel/Ad Hoc P/III/2022**

Panitia Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan Tahun 2022 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Perikanan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter/Hasil Laboratorium;
6. Berwibawa, cakap, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. Berpendidikan paling rendah strata satu bidang hukum dan/atau strata satu lainnya yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan;
8. Berpengalaman di bidang perikanan paling kurang 5 (lima) tahun;
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
11. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc*;
12. Bersedia ditempatkan di Pengadilan Perikanan seluruh wilayah Indonesia;
13. Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI;
14. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia.

Pendaftaran dilakukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar untuk menjadi Calon Hakim *Ad Hoc* ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- b. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang;
- c. Surat keterangan sehat jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah;
- d. Surat keterangan sehat rohani (kejiwaan) dari Rumah Sakit Pemerintah;
- e. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Pemerintah;
- f. Surat keterangan pengalaman di bidang perikanan dari Organisasi atau Institusi/Lembaga/Dinas setempat yang membidangi perikanan;
- g. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Surat keterangan dari unit kerja Inspektorat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat bagi PNS atau *security clearance* bagi TNI/POLRI;
- i. Surat pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik di atas kertas bermaterai Rp10.000,00;
- j. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc* di atas kertas bermaterai Rp10.000,00;
- k. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermaterai Rp10.000,00;
- l. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar berstatus Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI;
- m. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermaterai Rp10.000,00;
- n. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang warna merah sebanyak 4 (empat) lembar;
- o. Fotokopi KTP;
- p. Fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
- q. Daftar Riwayat Hidup lengkap;
- r. Bukti telah melaporkan harta kekayaan, dapat diserahkan setelah lulus ujian tertulis/pada saat ujian tertulis.

Catatan :

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui <http://adhoc-perikanan.mahkamahagung.go.id> mulai tanggal 10 Maret s.d. 8 April 2022;
2. Peserta yang telah melakukan pendaftaran online diwajibkan untuk mengirimkan seluruh persyaratan administrasi secara berurutan sesuai ketentuan tersebut di atas (huruf a s/d r) dan dimasukkan ke dalam amplop tertutup warna cokelat polos dengan mencantumkan tulisan: "Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan Tahun 2022", Nomor Telepon/HP dan pilihan tempat tes tertulis pada sudut kanan atas Surat Permohonan maupun pada Amplop Surat;
3. Lamaran diserahkan langsung/dikirimkan kepada Panitia Seleksi, ditujukan kepada Sekretariat Panitia Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan Tahun 2022 d.a. Direktorat Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gd. Mina Bahari IV Lt. 10 Jakarta Pusat. Lamaran diterima Panitia paling lambat tanggal 8 April 2022 (cap pos);
4. Pengumuman kelulusan administrasi dapat dilihat di website Mahkamah Agung www.mahkamahagung.go.id, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan www.kkp.go.id setelah tanggal 21 April 2022.
5. Seleksi tertulis akan dilaksanakan di Medan, Jakarta, dan Makasar, peserta menentukan sendiri pilihan tempat tes yang dicantumkan di amplop lamaran, waktu penyelenggaraan akan ditentukan kemudian.
6. Seleksi *Profile Assessment* dan Wawancara, tempat dan waktu penyelenggaraan akan ditentukan kemudian.
7. Dalam ujian seleksi tertulis diperkenankan untuk membuka buku (*Open Book*).
8. Proses seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan Tahun 2022 tidak dipungut biaya.

Jakarta, 10 Maret 2022

PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN TAHUN 2022

Ketua I

Ketua II

ttd

ttd

Dr. H. Suhadi, SH., MH.

Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han.